

# BAB III

## Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

#### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut terlihat dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 4 (empat) tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan cukup berarti. Realisasi capaian dari target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah dan gambaran kenaikan realisasi pendapatan Daerah dari tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-1**  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin  
tahun 2009- 2012

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG REALISASI	KENAIKAN (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2009	509.447.724.167,34	531.283.520.430,24	22.357.291.071,85	4,39
2010	550.451.389.841,88	560.378.406.162,18	29.094.885.731,94	5,48
2011	685.257.159.963,26	707.018.460.976,16	146.640.054.813,98	26,17
2012	773.083.169.720,36	794.253.487.214,81	87.235.026.238,65	12,34
		<b>Rata-rata Kenaikan Pertahun</b>		<b>12,09</b>

Sumber: DPKAD Kab. Merangin Tahun 2013

Tabel diatas menyajikan bahwa pada tahun 2009 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.531.283.520.430,24,- atau meningkat 4,39 %

dari tahun 2008. untuk tahun 2010 realisasi pendapatan Daerah sebesar Rp. 560.378.406.162,18 atau meningkat sebesar Rp. 29.094.885.731,94 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen) atau meningkat 5,48% dari tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp.707.018.460.976,16,- atau meningkat sebesar Rp. 146.640.054.813,98 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan ratus Tiga Belas Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) atau meningkat 26,15% dari tahun 2010. Sedangkan untuk tahun 2012 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.794.253.487.214,81 atau meningkat sebesar Rp.87.235.026.238,65 atau meningkat 12,34 % dari tahun 2011.

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: 1)Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut ini ditampilkan realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan komponen Pedapatan Daerah selama kurun waktu 2009 -2012, seperti yang termuat pada tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-2**

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 s/d 2012

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>28.582.225.348,99</b>	<b>27.822.176.728,73</b>	<b>25.224.329.265,18</b>	<b>39.647.952.626,68</b>	<b>36.514.393.019,32</b>
Pajak	4.298.144.356,00	4.163.211.925,00	4.540.879.223,00	7.268.001.726,00	7.712.895.456,00
Retribusi	7.575.052.862,35	6.879.750.024,00	7.827.987.907,00	16.555.846.647,00	10.722.172.413,00
Kekay. Dipisah	2.220.832.657,04	3.454.152.863,65	3.546.523.952,88	7.319.451.849,34	3.648.832.317,94
Lain-lain PAD Sah	14.488.195.473,60	13.325.061.916,08	9.308.938.182,30	8.504.652.404,34	14.430.492.832,38
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>446.427.616.836,00</b>	<b>455.979.166.889,00</b>	<b>492.791.630.981,00</b>	<b>564.504.923.388,00</b>	<b>669.098.687.585,00</b>
DBH Pajak/ Bukan Pajak	64.266.477.836	63.479.114.889,00	94.223.230.981,00	102.032.311.388,00	112.789.251.585,00
DAU	339.161.139.000,00	346.136.052.000,00	352.586.125.000,00	416.126.312.000,00	509.653.986.000,00

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
DAK	43.000.000.000,00	46.364.000.000,00	45.982.275.000,00	46.346.300.000,00	46.655.450.000,00
<b>LAIN-LAIN PEND. DAERAH YANG SAH</b>	<b>33.916.387.173,40</b>	<b>47.482.176.812,51</b>	<b>42.362.445.916,00</b>	<b>102.865.584.961,48</b>	<b>88.640.406.610,49</b>
Pend. Hibah	-	-	-	1.560.200.285,00	45.072.000,00
Dana Darurat	3.000.000.000,00	-	-	-	-
DBH Pajak Pemerintah Daerah	21.472.277.173,40	19.481.131.812,51	24.529.151.916,00	32.352.495.896,48	32.177.817.611,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.944.110.000,00	20.485.905.000,00	17.833.294.000,00	68.952.888.780,00	46.814.717.000,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	7.515.140.000,00	-	-	9.602.799.998,90
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>508.926.229.358,39</b>	<b>531.283.520.430,24</b>	<b>560.378.406.162,18</b>	<b>707.018.460.976,16</b>	<b>794.253.487.214,81</b>

Sumber: DPKAD Kab. Merangin Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dianalisa lebih lanjut tentang PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah, seperti berikut:

#### a). Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang merupakan otoritas daerah dan pelaksanaannya berbasis kepada potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Pemerintah Kabupaten Merangin selalu berupaya menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya. Hal ini berguna untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan Kabupaten Merangin.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Adapun Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Merangin dari tahun 2009 - 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-3.**  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 2009 -2012

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG REALISASI	KENAIKAN %
2009	32.526.442.193,95	27.822.176.728,73	(760.048.620,26)	(2,66)
2010	29.274.804.088,88	25.224.329.265,18	(2.597.847.463,55)	(9,34)
2011	38.510.106.169,34	39.647.952.626,68	14.423.623.361,50	57,18
2012	33.846.430.365,27	36.514.393.019,32	(3.133.559.607,36)	(7,90)
Rata-rata Kenaikan Pertahun				9,32

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami peningkatan pertahun 9,32%. Pada tahun 2009 realisasi PAD sebesar Rp.27.822.176.728,73,- atau menurun sebesar Rp.760.048.620,26,- atau menurun 2,66% dari tahun 2008. Untuk tahun 2010 realisasi PAD sebesar Rp.25.224.329.265,18,- atau menurun sebesar Rp.2.597.847.463,55 atau menurun 9,34% dari tahun 2009. selanjutnya pada tahun 2011 realisasi PAD sebesar Rp.39.674.952.626,68,- atau meningkat sebesar Rp. 14.423.623.361,50 atau meningkat 57,18% dari tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Merangin sebesar Rp.36.514.393.019,32,- atau menurun sebesar Rp.3.133.559.607,36 atau menurun 7,90% dari tahun 2011.

**b). Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil; 2) Dana Alokasi Khusus; dan 3) Dana Alokasi Umum.

Deskripsi tentang Dana Perimbangan Kabupaten Merangin tahun 2009-2012 dimuat pada tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-4**  
Dana Perimbangan dari Tahun 2009 - 2012

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG REALISASI	KENAIKAN %
2009	447.537.436.973,39	455.979.166.889,00	9.551.550.053,00	2,14
2010	482.682.434.828,00	492.791.630.981,00	36.812.464.092,00	8,07
2011	551.851.932.569,00	564.504.923.388,00	71.713.292.407,00	14,55
2012	641.452.242.940,42	669.098.687.585,00	104.593.764.197,00	18,53
<b>Rata-rata Kenaikan Pertahun</b>				<b>10,82</b>

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan dalam kurun waktu 4 ( empat ) tahun terus mengalami peningkatan 10,82 %. Pada tahun 2009 realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 455.979.166.889,00,- atau meningkat sebesar Rp.9.551.550.053,00,-) atau meningkat 2,14% dari tahun 2008. Untuk tahun 2010 realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar Rp.492.791.630.981,00,- atau meningkat 8,07% dari tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2011 realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar Rp.564.504.923.388,00,- meningkat sebesar Rp.71.713.292.407,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah*) atau meningkat 14,55% dari tahun 2010. Dan pada

tahun 2012 realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar Rp.669.098.687.585,00,- atau meningkat sebesar Rp.104.593.764.197,00 (atau meningkat 18,53% dari tahun 2011).

### c). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain. Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah terdiri dari: 1) Pendapatan Hibah; 2) Dana Darurat; 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dimuat pada tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-5.**  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin dari Lain-Lain  
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2009-2012

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG REALISASI	KENAIKAN %
2009	29.383.845.000,00	47.482.176.812,51	8.969.600.639,11	23,29
2010	38.494.150.925,00	42.362.445.916,00	(5.119.730.896,51)	(10,78)
2011	94.895.121.224,92	102.865.534.961,48	60.503.089.045,48	142,82
2012	97.784.496.414,67	88.640.406.610,49	(14.225.128.350,99)	(13,83)
<b>Rata-rata Kenaikan Pertahun</b>				<b>35,38</b>

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Tabel diatas menyajikan realisasi Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan, rata-rata peningkatan pertahun 35,38. Pada tahun 2009 realisasi Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.47.482.176.812,51,- meningkat sebesar Rp.8.969.600.639,11 atau meningkat 23,29 % dari tahun 2008, untuk tahun 2010 realisasi Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.42.362.445.916,00,- (atau menurun sebesar Rp. 5.119.730.896,51 atau menurun 10,78 % dari tahun 2009. Selanjutnya pada

tahun 2011 realisasi Pedapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.102.865.534.961,48,- atau meningkat Rp.60.503.089.045,48 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) atau meningkat 142,82% dari Tahun 2010. Dan pada tahun 2012 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Merangin sebesar Rp.88.640.406.610,49,- (*Delapan Puluh* atau menurun sebesar Rp.14.225.128.350,99 Atau menurun 13,83% dari tahun 2011.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

#### **3.1.2.1 Analisis Neraca**

Dalam 5 tahun terakhir, peningkatan jumlah asset yang dimiliki Kabupaten Merangin cukup besar. Pada tahun 2008, jumlah assetnya senilai Rp.836,95 milyar dan kemudian meningkat menjadi Rp.1,53 Trilyun di tahun 2012 atau meningkat sebesar 82,93%. Sedangkan jumlah kewajiban di tahun 2008 sebesar Rp.103,15 juta menjadi Rp.0,- (nol) pada tahun 2012. Berarti Pemerintah Kabupaten Merangin tidak ada memiliki hutang atau kewajiban pada tahun tersebut.

Untuk ekuitas dana juga terjadi peningkatan searah dengan peningkatan jumlah kepemilikan asset daerah oleh Kabupaten Merangin. Pada tahun 2008, jumlah ekuitas dana yang dimiliki senilai Rp.836,82 milyar, lalu meningkat menjadi Rp.1,53 Trilyun di tahun 2012 atau meningkat sebesar 83,81%. Bagian dari ekuitas dana yang paling besar peningkatannya adalah ekuitas dana investasi dimana pada tahun 2008 dimiliki sebesar Rp.735 milyar dan meningkat menjadi Rp.1,47 Trilyun di tahun 2012 atau meningkat sebesar 99,79%. Sedangkan ekuitas dana lancar terjadi penurunan dari senilai Rp.101,04 milyar di tahun 2008 menjadi Rp.61,79 milyar di tahun 2012 atau turun sebesar 38,85%.

Deskripsi tentang asset dan kewajiban yang dimiliki Kabupaten Merangin selama tahun 2008-2012 dijabarkan kedalam neraca daerah 5 tahunan. Adapun neraca daerah tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

**Tabel T.III C-6.**  
Neraca Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	88.572.887.166,47	47.915.851.659,71	36.123.229.163,39	29.506.728.676,90	44.656.063.182,03
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.761.326.728,00	3.068.732.046,00	1.393.164.748,85	1.361.696.632,00	1.254.224.035,79
5	Kas di Bendahara Penerimaan	11.260.750,00	149.109.136,00	39.186.850,00	241.917.425,00	95.423.882,00
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	8.606.936.847,00	1.950.285.026,21	0,00
7	Piutang Pajak	58.783.750,00	4.445.600,00	680.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
8	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.270.886.472,20	5.042.668.343,00	5.916.573.339,00	8.763.273.727,00	9.948.376.857,00
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	34.727.000,00	31.727.000,00	162.162.400,00	101.162.400,00
10	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	374.639.166,00	0,00	106.140.000,00	151.092.652,00	149.092.652,00
11	Piutang Retribusi	362.241.487,00	253.344.816,00	776.613.899,00	698.417.000,00	1.135.159.650,00
12	Piutang Lain-lain	2.733.915.302,00	22.534.061.575,00	616.807.676,75	350.124.848,00	373.324.848,00
13	Persediaan	0,00	4.003.549.276,53	4.122.859.549,00	4.053.598.405,00	4.074.619.888,00
<b>14</b>	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>101.145.940.821,67</b>	<b>83.006.489.452,24</b>	<b>57.733.919.072,99</b>	<b>47.240.421.792,11</b>	<b>61.788.572.394,82</b>
15	INVESTASI JANGKA PANJANG					
16	Investasi Non Permanen					
17	Investasi Dana Bergulir	1.585.724.674,92	1.585.724.674,00	1.585.724.674,00	1.585.724.674,00	2.644.678.500,00
18	(Cadangan atas dana bergulir diragukan tertagih)	429.351.652,83	431.821.464,15	431.821.464,15	431.821.464,15	431.821.464,15
<b>19</b>	<b>Jumlah Investasi Non Permanen (17+18)</b>	<b>1.156.373.022,09</b>	<b>1.153.903.209,85</b>	<b>1.153.903.209,85</b>	<b>1.153.903.209,85</b>	<b>2.212.857.035,85</b>
20	Investasi Permanen					
21	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.590.998.821,00	12.391.000.000,00	12.391.000.001,00	12.391.000.002,00	12.391.000.003,00
22	Jumlah Investasi Permanen (21)	11.590.998.821,00	12.391.000.000,00	12.391.000.001,00	12.391.000.002,00	12.391.000.003,00
<b>23</b>	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (19+22)</b>	<b>12.747.371.843,00</b>	<b>13.544.903.209,85</b>	<b>13.544.903.210,85</b>	<b>13.544.903.211,85</b>	<b>13.544.903.212,85</b>
24	ASET TETAP					
25	Tanah	16.674.418.225,00	18.813.456.425,00	19.667.722.743,00	20.883.748.743,00	21.132.135.743,00
26	Peralatan dan Mesin	128.584.152.123,00	169.876.920.938,00	192.584.078.638,00	227.128.315.660,00	241.711.504.632,00
27	Gedung dan Bangunan	180.808.248.587,38	216.194.430.866,38	241.916.681.117,38	288.169.963.855,00	327.252.272.276,38
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	373.739.828.862,00	450.202.274.758,00	568.468.627.540,00	665.486.676.468,00	810.722.086.384,00

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
29	Aset tetap lainnya	17.681.657.890,00	20.076.138.490,00	28.900.007.682,00	36.137.901.383,00	38.456.775.083,00
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.538.832.799,00	4.538.832.799,00	3.797.588.434,00	4.783.943.770,00	14.873.527.770,00
<b>31</b>	<b>Jumlah Aset Tetap (25~30)</b>	<b>722.027.138.486,38</b>	<b>879.702.054.276,38</b>	<b>1.055.334.706.154,38</b>	<b>1.242.590.549.879,00</b>	<b>1.454.148.301.888,38</b>
32	ASET LAINNYA	34.727.000,00				
33	Aset tak berwujud	970.504.000,00	970.504.000,00	1.094.464.391,00	1.556.082.188,00	1.911.860.253,00
<b>34</b>	<b>Jumlah Aset Lainnya (33)</b>	<b>1.005.231.000,00</b>	<b>970.504.000,00</b>	<b>1.094.464.391,00</b>	<b>1.556.082.188,00</b>	<b>1.911.860.253,00</b>
<b>35</b>	<b>JUMLAH ASET (14+23+31+34)</b>	<b>836.925.682.151,05</b>	<b>977.223.950.938,47</b>	<b>1.127.707.992.829,22</b>	<b>1.304.931.957.070,96</b>	<b>1.531.393.637.749,05</b>
36	KEWAJIBAN					
37	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.350.000,00				
38	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	99.800.000,00	0,00	8.570.251.465,00	1.908.495.000,00	0,00
<b>39</b>	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (38)</b>	<b>103.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.251.465,00</b>	<b>1.908.495.000,00</b>	<b>0,00</b>
40	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
<b>41</b>	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (41)</b>					
<b>42</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (39+41)</b>	<b>103.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.251.465,00</b>	<b>1.908.495.000,00</b>	<b>0,00</b>
43	EKUITAS DANA					
44	EKUITAS DANA LANCAR					
45	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)	92.330.863.894,47	50.984.583.705,71	37.516.393.912,24	30.868.425.308,90	45.910.287.217,00
46	Pendapatan yang Ditangguhkan	11.260.750,00	149.109.136,00	75.872.232,00	283.707.451,21	95.423.882,00
47	Cadangan Piutang	6.066.550.875,20	27.869.247.334,00	7.448.541.914,75	10.126.195.627,00	11.708.241.407,00
48	Cadangan Persediaan	2.733.915.302,00	4.003.549.276,53	4.122.859.549,00	4.053.598.405,00	4.074.619.888,00
49	(Dana yang harus dikeluarkan untuk pembayaran utang jangka pendek)	99.800.000,00	0,00			
<b>50</b>	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (44~48)</b>	<b>101.042.790.821,67</b>	<b>83.006.489.452,24</b>	<b>49.163.667.607,99</b>	<b>45.331.926.792,11</b>	<b>61.788.572.394,00</b>
51	EKUITAS DANA INVESTASI					
52	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	12.747.371.843,98	13.544.903.209,85	13.544.903.209,85	13.544.903.210,85	14.603.857.036,85
53	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	722.027.138.486,38	879.702.054.276,38	1.055.334.706.154,38	1.242.540.549.897,38	1.454.148.310.888,38
54	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.005.231.000,00	970.504.000,00	1.094.464.391,00	1.556.082.188,00	1.911.860.253,00
55	(Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang)					
<b>56</b>	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (52~55)</b>	<b>735.779.741.330,36</b>	<b>894.217.461.486,23</b>	<b>1.069.974.073.755,23</b>	<b>1.257.641.535.296,23</b>	<b>1.470.664.028.178,23</b>
<b>57</b>	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (50+56)</b>	<b>836.822.532.152,03</b>	<b>977.223.950.938,47</b>	<b>1.119.137.741.363,22</b>	<b>1.302.973.462.088,34</b>	<b>1.532.452.600.572,23</b>
<b>58</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (42+57)</b>	<b>836.925.682.152,03</b>	<b>977.223.950.938,47</b>	<b>1.127.707.992.828,22</b>	<b>1.304.881.957.088,34</b>	<b>1.532.452.600.572,23</b>

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin, 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah asset lancar turun dengan besaran yang sama dengan jumlah ekuitas dana lancar. Ini berarti pembiayaan asset lancar dibiayai 100% dengan dana dari ekuitas dana lancar.

Khusus untuk asset lancar terlihat peningkatan pada komponen piutang bagi hasil pajak Provinsi. Pada tahun 2008, piutang tersebut berjumlah Rp.5,27 milyar, lalu meningkat menjadi Rp.9,95 milyar di tahun 2012 atau meningkat sebesar 88,80%. Berarti Pemerintah Provinsi yang mayoritas berasal dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada pemerintah Kabupaten Merangin.

Sedangkan asset tetap juga terjadi peningkatan pada tahun 2008, jumlah asset Kabupaten Merangin senilai Rp.836,93 milyar lalu meningkat sebesar 82,93%. Komponen yang paling besar peningkatannya adalah asset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan. Pada tahun 2008, asset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp.373,74 milyar kemudian menjadi Rp.810,72 milyar ditahun 2012 atau meningkat sebesar 116,92%.

### 3.1.2.2 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terhadap neraca daerah Kabupaten Merangin tahun 2008-2012 dilakukan dengan menggunakan 4 rasio keuangan. Keempat rasio keuangan tersebut adalah.

- a. Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio asset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio Quick (Quick Ratio) merupakan rasio asset lancar dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek.
- c. Rasio Hutang terhadap Asset merupakan rasio kewajiban terhadap asset.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal merupakan rasio kewajiban terhadap ekuitas dana.

Berdasarkan pengertian keempat rasio diatas, maka dilakukan perhitungan terhadap neraca daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2008-2012. Hasil perhitungan keempat rasio tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

**Tabel T.III C-7**  
Rasio Keuangan Kabupaten Merangin  
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio Lancar	98,06	...*)	6,74	24,75	...*)
2	Rasio Quick	98,06	...*)	6,26	22,63	...*)
3	Rasio Hutang terhadap Asset	0,00012	...*)	0,00876	0,00146	...*)
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,00012	...*)	0,00766	0,00146	...*)

*Keterangan: \*) Pada tahun 2009 dan 2012 tidak ada kewajiban jangka pendek (Rp.0) dari jumlah kewajiban adalah 0 (nol) rupiah (Rp.0)*

Mengacu kepada hasil perhitungan rasio keuangan yang terdapat pada tabel diatas maka dapat dilakukan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

#### **A. Rasio Lancar**

Rasio lancar Kabupaten Merangin selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2009 dan 2012, Pemerintah Kabupaten Merangin tidak melakukan pinjaman sehingga kewajiban jangka pendek RP.0,- (nol). Berarti asset lancar sangat aman karena tidak ada kewajiban jangka pendek. Akan tetapi, rasio lancar tahun 2010 terlihat angkanya 6,74. Berarti asset lancar dapat menjamin kewajiban jangka pendek sebangak 6,74 kali. Untuk tahun 2008 dan 2011, rasio lancar cukup besar yaitu 98,06 dan 24,75. Angka tersebut cukup besar untuk memberikan garansi atas pinjaman jangka pendek yang diambil Pemerintah Kabupaten Merangin.

#### **B. Rasio Quick**

Hasil perhitungan rasio quick tidak jauh berbeda dengan rasio lancar kendatipun dalam rasio quick terdapat pengurangan oleh persediaan. Rasio

Quick tahun 2009 dan 2012 tidak ada karena Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memiliki kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio Quick tahun 2008 dan 2010 relatif sama besar karena persediaannya relatif kecil pada kedua tahun tersebut. Untuk tahun 2011 terjadi sedikit perbedaan rasio quick karena persediaannya terjadi perubahan. Ini berarti analisis rasio Quick dengan rasio lancar hamper sama.

### **C. Rasio Hutang Terhadap Asset**

Rasio hutang terhadap asset selama 5 tahun terakhir sangat kecil karena Pemerintah Kabupaten Merangin punya kewajiban yang relative kecil. Bahkan untuk tahun 2009 dan 2012, Kabupaten Merangin tidak memiliki kewajiban atau pinjaman sama sekali (Rp.0). Untuk tahun 2008, 2010 dan 2011 rasio hutang terhadap asset rata-rata sebesar 0,00345. Angka tersebut sangat aman untuk menjamin kewajiban atas pemilik asset oleh Kabupaten Merangin.

### **D. Rasio Hutang Terhadap Modal**

Rasio hutang terhadap modal untuk Kabupaten Merangin selama 5 tahun terakhir tidak jauh berbeda dengan rasio hutang terhadap asset. Hal ini disebabkan oleh pembelanjaan atas asset dibiayai dari ekuitas dana. Pemerintah Kabupaten Merangin sangat hati-hati melakukan pinjaman sehingga tahun 2009 dan 2012 Kabupaten Merangin tidak memiliki kewajiban.

## **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Penggunaan anggaran melalui APBD Kabupaten Merangin akan tergambar dalam kebijakan belanja daerah. Untuk itu perlu melihat perkembangan belanja daerah Kabupaten Merangin selama kurun waktu 2009-2012 seperti yang termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel T.III C-8

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2009 - 2012

TAHUN	BELANJA DAERAH		PERTUMBUHAN (%)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2009	600.778.588.061,81	571.829.800.619,00	5,43	12,68
2010	598.785.723.547,59	570.987.168.014,01	(0,33)	(0,15)
2011	721.773.553.875,50	648.321.101.930,00	20,54	13,54
2012	803.951.595.029,26	779.211.625.305,89	11,39	20,19
	Rata-rata Kenaikan Pertahun		9,25	11,57

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Tabel diatas, menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2009 telah terjadi peningkatan target dan realisasi belanja Daerah secara signifikan masing-masing sebesar 5,43% dan 12,68%. Namun tahun 2010 terjadi penurunan target dan realisasi belanja daerah masing-masing sebesar 0,33% dan 0,15%. Kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan target dan realisasi belanja daerah masing-masing sebesar 20,54% dan 13,54%. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan target dan realisasi belanja daerah masing-masing sebesar 11,39% dan 20,19%.

Apabila dilihat dari sisi target dan realisasi Belanja Daerah dari Tahun 2009-2012, terjadi peningkatan masing-masing sebesar 9,25 % dan 11,57% pertahun. Tidak terealisasinya 100% antara target belanja daerah yang telah ditetapkan ini mengindikasikan bahwa, anggaran yang telah dialokasikan dalam belanja tidak harus habis tetapi dapat dilakukan sebagai efisiensi terhadap pengeluaran yang kurang bermanfaat dan kurang dibutuhkan, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Sisa hasil pengeluaran tersebut dapat dijadikan pemasukan bagi penerimaan daerah, untuk kemudian dialokasikan lagi pada berbagai kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Merangin selama 4 (empat) tahun terakhir yakni 2009-2012 diarahkan pada pengaturan pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun Belanja Daerah berdasarkan kelompok Belanja yaitu:

#### **A. Belanja Tidak Langsung**

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dirinci menurut belanja yaitu:

- a) **Belanja Pegawai**, yang merupakan belanja kompensasi, yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan dan diarahkan untuk Gaji PNS, *accres*, uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b) **Belanja Bunga**, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang atas kewajiban pokok utang (Principal Outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c) **Belanja Subsidi**, hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d) **Belanja Hibah**, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah atau

Pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

- e) **Belanja Bantuan Sosial**, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f) **Belanja Bagi Hasil**, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.
- g) **Belanja Bantuan Keuangan**, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Kepada Pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

**B. Belanja Langsung,**

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimaksudkan guna mewujudkan prioritas pembangunan yang dirumuskan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Kelompok belanja langsung dirinci menjadi jenis belanja yang terdiri dari :

- a) **Belanja Pegawai**, yaitu belanja yang dipergunakan untuk pengeluaran honorarium, dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk pengeluaran pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa ini meliputi belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas.
- c) **Belanja Modal**, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Perkembangan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin selama 2009-2012 cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,98% dan 20,67% pertahun. Gambaran secara menyeluruh target dan realisasi Pembiayaan Daerah dari tahun 2009-2012 disajikan kedalam tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-9**  
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin  
Tahun 2009-2012

TAHUN	PEMBIYAAAN DAERAH		PERTUMBUHAN (%)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2009	91.330.863.894,47	91.530.863.894,47	0,10	0,69
2010	50.984.583.705,71	48.016.620.054,71	(44,18)	(47,54)
2011	36.516.393.912,24	37.516.393.912,74	(28,38)	(21,87)
2012	30.868.425.308,90	32.277.228.798,90	(15,47)	(13,97)
	<b>Rata-rata Kenaikan Pertahun</b>		<b>(21,98)</b>	<b>(20,67)</b>



URAIAN	REALISASI (RP)			
	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
<b>Pokok Utang</b>				
<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>91.530.863.894,47</b>	<b>48.016.620.054,71</b>	<b>37.516.393.912,74</b>	<b>32,277,228,798.90</b>

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Selama tahun 2009-2012, Pembiayaan daerah di Kabupaten Merangin belum terdapat permasalahan yang krusial. Secara umum terjadi kecenderungan penurunan penerimaan pembiayaan karena semakin efektifnya penyerapan APBD. Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Merangin masih berupa penyertaan modal pada Bank Jambi.

Kebijakan Pembiayaan Daerah, Kabupaten Merangin telah melakukan upaya peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutupi defisit anggaran yang disebabkan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat atau juga memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### a). Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

**b). Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2009-2013 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadinya surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

**3.3 Kerangka Pendanaan**

**3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat**

Untuk menganalisis pengeluaran periodik yang mengikat terhadap pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin, maka perlu dianalisis pengeluaran berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran realisasi pengeluaran keuangan berdasarkan

pengelompokan belanja daerah yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-11**  
Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Pengelompokan Belanja Tidak  
Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2009 s/d 2012  
Kabupaten Merangin

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI/TAHUN (Rp)			
	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>279.645.791.551,00</b>	<b>322.779.441.013,01</b>	<b>313.932.611.230,00</b>	<b>391.741,876,720.89</b>
• Belanja Pegawai	229.892.474.778,00	281.322.248.196,01	273.128.025.530,00	358.960.517.799,89
• Belanja Bunga	-	-	-	-
• Belanja Subsidi	983.556.000,00	-	-	-
• Belanja Hibah	19.848.920.000,00	6.937.427.183,00	5.191.150.000,00	4,432,485,099.00
• Belanja Bantuan Sosial	6.981.409.983,00	10.794.146.184,00	10.033.378.700,00	3,310,300,000.00
• Belanja Bagi Hasil	1.202.579.790,00	1.442.474.450,00	1.534.960.000,00	1.534.960.000,00
• Belanja Bantuan Keuangan	18.566.693.000,00	20.691.400.000,00	22.545.097.000,00	22.026.350.500,00
• Belanja Tidak Terduga	2.170.158.000,00	1.591.745.000,00	1.500.000.000,00	1.477.263.322,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>292.184.009.068,00</b>	<b>248.207.727.001,00</b>	<b>334.388.490.700,00</b>	<b>387,469,748,585.00</b>
• Belanja Pegawai	33.837.934.939,00	36.427.829.312,00	48.258.874.350,00	58,017,809,773.00
• Belanja Barang dan Jasa	106.555.695.333,00	93.347.121.022,00	110.179.345.370,00	126,662,708,260.00
• Belanja Modal	151.790.378.796,00	118.432.776.667,00	175.950.270.980,00	202.789.230.552,00
<b>JUMLAH</b>	<b>571.829.800.619,00</b>	<b>570.987.168.014,01</b>	<b>648.321.101.930,00</b>	<b>779.211.625.305,89</b>

Sumber: DPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Dari sajian tabel diatas dapat dianalisa belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti berikut ini:

**a) Belanja Tidak Langsung**

Selama kurun waktu 4 ( empat ) tahun perkembangan Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Merangin cenderung mengalami peningkatan dengan peningkatan target dan realisasi pertahun masing-masing sebesar 10,04% dan 13,47% pertahun. Untuk lebih detilnya gambaran target dan realisasi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2008-2012 dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel T.III.C-12**

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Merangin Tahun 2009-2012

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		PERTUMBUHAN (%)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2009	288.210.008.299,81	279.645.791.551,00	3,73	16,43
2010	321.698.356.997,59	322.779.441.013,01	11,62	15,42
2011	349.207.204.110,00	313.932.611.230,00	8,55	(2,74)
2012	406.034.858.644,48	391.741.876.720,89	16,27	24,79
Rata-rata Kenaikan Pertahun			<b>10,04</b>	<b>13,47</b>

Sumber : DPKAD Kab. Merangin Tahun 2013

**b) Belanja Langsung**

Selama kurun waktu 4 ( empat ) tahun perkembangan Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Merangin cenderung mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,24% dan 11,21% pertahun. Untuk lebih rincinya gambaran target dan realisasi Belanja Langsung dari tahun 2009-2012 dapat diamati tabel berikut ini:

**Tabel T.III C-13**  
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Merangin  
Tahun 2009 s/d 2012

TAHUN	BELANJA LANGSUNG		PERTUMBUHAN (%)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2009	312.568.579.762,00	292.184.009.068,00	7,04	9,30
2010	277.087.366.550,00	248.207.727.001,00	(11,35)	(15,05)
2011	372.566.349.765,50	334.388.490.700,00	34,46	34,72
2012	397.916.736.384,78	387.469.748.585,00	6,80	15,87
	Rata-rata Kenaikan Pertahun		9,24	11,21

Sumber : DPKAD Kab. Merangin Tahun 2013

### 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dibuat guna mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut. Oleh karena itu, sebelum membuat rencana penggunaan anggaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka harus dilakukan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Untuk rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, maka akan di proyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk tahun 2014-2018.

Dalam memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut digunakan asumsi bahwa rerata kenaikan pendapatan 22,75% pertahun dengan pola *decrease*. Sedangkan kecenderungan sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA) makin mengecil. Disamping itu, kenaikan Belanja Tidak Langsung Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dengan rerata kenaikan sebesar 19% pertahun.

Berdasarkan asumsi diatas, maka dilakukan perhitungan penentuan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan

jangka menengah Kabupaten Merangin tahun 2014-2018. Hasil perhitungan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

**Tabel T.III C-14**  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah  
Kabupaten Merangin

No	Uraian	Proyeksi ( Rp.Juta)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan	981.773,25	1.129.039,24	1.388.718,26	1.708.123,46	2.092.451,24
2	Pencairan Dana Cadangan ( Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	29.049,00	26.144,10	23.791,13	21.887,84	20.355,69
4	Total Penerimaan	1.010.822,25	1.155.183,34	1.412.509,39	1.730.011,30	2.112.806,93
Dikurangi:						
5	Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	412.233,67	474.068,72	568.882,46	676.970,13	798.824,76
6	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	598.588,58	681.114,62	843.626,93	1.053.041,17	1.313.982,18

*Sumber: Data Olahan, 2013*

Berlandaskan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 seperti yang termuat pada tabel diatas, maka dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Penggunaan Anggaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin. Dalam membuat rencana anggaran tersebut, digunakan pula asumsi bahwa modus kenaikan Belanja Langsung pertahun adalah sebesar 22,25%. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung, digunakan modus kenaikan sebesar 22% pertahun.

Disamping itu, diproyeksikan pula Pengeluaran Pembiayaan Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama cenderung meningkat tiap tahunnya yang diawali sebesar Rp.1,5 milyar di tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp.6 milyar di tahun 2018. Berdasarkan asumsi yang digunakan tersebut, maka dilakukan proyeksi untuk rencana penggunaan anggaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 seperti yang dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini.

**Tabel T.III C-15**  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Merangin

No	Uraian	Proyeksi (Rp.Juta)				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	598.588,58	681.114,62	843.626,93	1.053.041,17	1.313.982,18
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
II.a	Belanja langsung	423.596,51	465.956,16	559.147,39	701.729,98	859.619,22
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	152.998,52	179.008,27	223.760,34	261.799,59	308.923,52
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib mengikat serta prioritas utama	0	1.500	2.500	3.750	5.750
II	Total rencana pengeluaran prioritas (II.a+b+c+d)	576.595,03	646.464,43	785.407,73	967.279,57	1.174.292,74
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas (I-II)	21.993,55	34.650,19	58.219,20	85.761,60	139.689,43
	Rencana ALokasi Pengeluaran Prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	419.476,10	482.397,52	602.996,89	735.656,21	897.500,58
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	412.233,67	474.068,72	568.882,46	676.970,13	798.824,76
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-b)	7.242,43	8.328,79	34.114,43	58.686,08	98.675,82
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	14.751,12	26.321,39	24.104,77	27.075,52	41.013,61

Sumber: Data Olahan, 2013

Dari paparan tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya terdapat surplus anggaran riil atas penggunaan anggaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama tahun 2014-2018 di Kabupaten Merangin. Ini berarti, penggunaan anggaran tersebut menganut konsep surplus. Setiap tahunnya di proyeksikan akan didapati sisa anggaran riil yang berbasis pada kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.